



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 94 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa belanja daerah sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta pendukung penyelenggaraan pemerintahan perlu dilaksanakan secara tertib dan cermat;
- b. bahwa untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu menambah standar harga satuan biaya umum yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk kepastian hukum penambahan standar harga satuan biaya umum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;

d. berdasarkan...

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420);
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal...

Pasal I

Ketentuan huruf B angka 3 huruf b, huruf B angka 12 huruf b, huruf B angka 22 huruf g, huruf B angka 23 huruf d, huruf B angka 26, huruf B angka 27, huruf B angka 33, huruf B angka 39, huruf C angka 4, Huruf D angka 1, huruf E angka 1, huruf G angka 1, huruf G angka 2, huruf H angka 1, dan huruf I Lampiran Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 diubah serta ditambahkan 1 (satu) angka pada huruf C, yakni angka 5, dan ditambahkan 1 (satu) angka pada huruf L, yakni angka 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 23) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 94

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT. S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 94 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023

B. SATUAN BIAYA BELANJA JASA KANTOR

- 3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
 - b. Honorarium Tim Kerja Tertentu

Honorarium tim kerja tertentu diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang tim kerjanya dibentuk secara khusus dan pengaturannya di luar ketentuan tim kerja. Satuan honorarium tim kerja tertentu adalah Orang per Bulan (OB), yang diberikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Honorarium Tim Kerja Tertentu, terdiri atas:

- 1) Honorarium Tim Kerja Tertentu

Tabel B.4
Honorarium Tim Kerja Tertentu

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua	Triwulan	7.000.000
2.	Wakil	Triwulan	5.500.000
3.	Anggota	Triwulan	4.000.000

12. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

- b. tenaga petugas dan relawan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Biaya jasa tenaga petugas dan relawan COVID-19 dipergunakan untuk alokasi pembayaran jasa pelayanan COVID-19 dengan ketentuan diberikan tiap bulan dan dianggarkan pada Dinas Kesehatan. Biaya jasa tenaga petugas dan relawan COVID-19 diberikan sebagai berikut:

Tabel B.23
Jasa Tenaga Petugas dan Relawan COVID-19

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Insentif relawan tenaga kesehatan dan nonkesehatan Rumah Sakit Khusus (RSK) COVID-19 (dokter umum)	OB	10.000.000
2.	Insentif relawan tenaga kesehatan dan nonkesehatan RSK COVID-19 (dokter spesialis)	OB	15.000.000
3.	Insentif relawan tenaga kesehatan dan nonkesehatan RSK COVID-19 (perawat dan tenaga kefarmasian, nutrisisionis, serta sanitarian)	OB	6.000.000
4.	Insentif relawan tenaga kesehatan dan nonkesehatan RSK COVID-19 (administrasi, supir ambulans, <i>sprayer</i> (petugas disinfeksi), pekarya)	OB	4.000.000
5.	Insentif Pelayanan COVID-19 (Dokter Spesialis)	OB	15.000.000
6.	Insentif Pelayanan COVID-19 (Dokter Umum dan Dokter Gigi)	OB	10.000.000
7.	Insentif Pelayanan COVID-19 (Bidan dan Perawat)	OB	7.500.000
8.	Insentif Pelayanan COVID-19 (Tenaga Kesehatan Lainnya)	OB	5.000.000
9.	Petugas Keamanan Rumah Singgah COVID-19		
	a. TNI	OB	4.000.000
	b. POLRI	OB	4.000.000
	c. SATPOL PP kecamatan di rumah singgah	OB	4.000.000

22. Belanja Jasa Tenaga Administrasi

g. Petugas Administrasi Perizinan

Guna meningkatkan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diberikan honorarium kepada petugas layanan perizinan yang dibayarkan setiap bulan. Honorarium petugas administrasi perizinan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.49

Honorarium Petugas Administrasi Perizinan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Layanan Perijinan DPMPTSP	OB	1.500.000
2.	Petugas <i>Helpdesk</i> Pelayanan (OSS dan SIMBG) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	OB	1.500.000

23. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer

d. Operator/Pengolah Data pada Perangkat Daerah dan BLUD

Honorarium operator/pengolah data pada Perangkat Daerah dan BLUD diberikan sebagai berikut:

Tabel B.53

Honorarium Operator/Pengolah Data pada Perangkat Daerah dan BLUD

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Operator Input Data e-Sakip	O/Tw	2.000.000
2.	Operator Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	OB	2.500.000
3.	Operator Penatausahaan/Pengelola Keuangan	OB	1.500.000
4.	Operator Pengelola Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial	OB	2.000.000

	Operator Perbaikan DTKS Dinas Sosial	OK	750.000
--	--------------------------------------	----	---------

Catatan: Operator e-Sakip dan Operator RKA/DPA hanya 1 (satu) orang pada setiap Perangkat Daerah.

26. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Belanja jasa tenaga kebersihan merupakan honorarium yang diberikan kepada Non-ASN yang ditugaskan sebagai petugas/tenaga kebersihan, penyapu jalanan, makam, taman, pemangkas pohon, kebersihan tempat pembuangan akhir (TPA)/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), penarik retribusi kebersihan tempat pembuangan akhir (TPA)/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tenaga lainnya yang setara dapat dibayarkan per orang per bulan. Belanja jasa tenaga kebersihan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.62

Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Kebersihan Melalui Penyedia	OB	2.500.000
2.	Petugas Kebersihan (Tidak) Melalui Penyedia	OB	2.000.000
3.	Satuan Petugas Kebersihan dan Pertamanan RSUD		
	Koordinator	OB	2.900.000
	Kepala Regu	OB	2.500.000
	Kepala Taman	OB	2.450.000
	Anggota Taman/Kebersihan	OB	2.400.000
7.	Petugas Kebersihan TPA	OB	2.250.000
8.	Pengawas Kebersihan/Pesapon/Ruang Terbuka Hijau (RTH)/TPA/Lingkungan Hidup	OB	1.750.000
9.	Pesapon Jalan/Taman/RTH	OB	2.000.000
10.	Penanaman Pohon pada DLHK	OP	125.000
11.	Pengawas Petugas Kebersihan DLHK	OB	2.500.000
12.	Petugas Pemotong Rumput DLHK	OB	1.700.000

13.	Petugas Perawatan Taman DLHK	OB	1.500.000
14.	Petugas Perawatan Pohon DLHK	OB	1.500.000
15.	Penebang Pohon DLHK	OP	400.000
16.	Tukang Galian Lumpur	OH	150.000
17.	Tukang Babat Rumput	OH	150.000
18.	Satuan Petugas Kebersihan dan Pertamanan RSUD		
	Koordinator	OB	3.000.000
	Kepala Regu	OB	2.500.000
	Kepala Taman	OB	2.450.000
	Anggota Taman/Kebersihan	OB	2.200.000

27. Belanja Jasa Tenaga Keamanan

Belanja jasa keamanan diberikan sebagai berikut:

Tabel B.63
Honorarium Jasa Tenaga Keamanan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Petugas Bantuan Pengamanan pada Penegakan Peraturan Daerah/Ketertiban Umum *	OH	150.000
2.	Tenaga untuk pengamanan pengadaan/pembebasan lahan	OB	1.500.000
3.	Tenaga Kesehatan Kegiatan Lapangan	OK	1.200.000
4.	Petugas Bantuan Pengamanan pada Penegakan Peraturan Daerah/Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	OK	1.000.000
5.	Tenaga Pengamanan Naskah	OH	100.000
6.	Jasa Pengamanan melalui penyedia jasa	OB	2.500.000
7.	Jasa Pengamanan (tidak) melalui penyedia jasa	OB	2.000.000
8.	Petugas Pengamanan Kawasan Pusat Pemerintahan (PUSPEM)/RTH	OB	2.000.000
9.	Petugas Keamanan Stand Pameran	OH	300.000
10.	Petugas Keamanan/Piket Malam pada Penyelenggaraan Diklat Pegawai	OH	40.000
11.	Penjaga Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pemerintah	OB	1.500.000

12.	Penjaga Taman Makam Pahlawan	OB	1.500.000
13.	Bantuan Tugas Pengamanan	OH	50.000
14.	Satuan Petugas Pengamanan RSUD		
	Koordinator	OB	2.900.000
	Kepala Regu	OB	2.500.000
	Anggota	OB	2.400.000

Catatan:

* Bantuan Tugas Pengamanan melibatkan TNI dan POLRI.

33. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

Besaran belanja jasa penyelenggaraan acara merupakan pemberian biaya transportasi kepada peserta rapat untuk menunjang pelaksanaan kelancaran kegiatan.

Tabel B.69
Transportasi Peserta Rapat

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Transportasi Peserta Rapat (di luar Kabupaten Tangerang)	OK	150.000

39. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan

Tabel B.75
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Advetorial di media cetak mingguan - Advetorial di media elektronik radio	Per On Air	5.000.000
2.	Advetorial di media cetak mingguan - Press Release	Per Terbit	500.000
3.	Advetorial di media elektronik TV Kegiatan seremonial/pembukaan/ penutupan kegiatan tingkat daerah/ MUSRENBANG Daerah	Per Tayang	27.500.000
4.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Majalah Hitam Putih	Per Halaman	10.000.000
5.	Advetorial di media cetak mingguan - Berwarna	Per Halaman	20.000.000

6.	Advetorial di media cetak mingguan - Hitam Putih	Per Halaman	10.000.000
7.	Advetorial di media cetak mingguan - Advetorial di media elektronik tv	Per Paket	12.500.000
8.	Advetorial di media cetak mingguan - Advetorial di media elektronik internet	Per Tayang	5.000.000
9.	Advetorial dan Iklan	Per Tayang	70.000.000
10.	Advetorial dan Iklan	Per Tayang	65.000.000
11.	Advetorial dan Iklan	Per Tayang	50.000.000
12.	Advetorial dan Iklan	Per Tayang	75.000.000
13.	Advetorial dan Iklan	Per Tayang	100.000.000
14.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Harian Lokal Berwarna	Per Halaman	20.000.000
15.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Harian Lokal Hitam Putih	Per Halaman	10.000.000
16.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Harian Nasional Berwarna	Per Halaman	25.000.000
17.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak Harian Nasional Hitam Putih	Per Halaman	20.000.000
18.	Pemasangan Iklan/Informasi Program Pembangunan di Media Cetak - Majalah Berwarna	Per Halaman	15.000.000
19.	Publikasi	Paket	1.000.000
20.	Publikasi	Paket	1.500.000
21.	Publikasi	Paket	2.000.000

C. Satuan Biaya Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

4. Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Non-ASN

Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan diperuntukkan bagi pegawai Non-ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang diharapkan akan meningkatkan kinerja setiap pegawai dalam membantu pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non-ASN di anggarkan dalam kegiatan berkenaan maksimal 12 (dua belas) bulan.

Tabel C.4
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Non-ASN

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	OB	6.000
2.	Jaminan Kematian (JKM)	OB	7.500

5. Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan/Informal

Pekerja rentan atau informal adalah pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja di mana pekerja tersebut berusaha secara mandiri atau bekerja perorangan. Pada umumnya mereka bekerja pada usaha ekonomi informal, antara lain usaha kuliner, petani, nelayan, peternak, penjahit, pedagang, usaha bengkel, atlet, pengemudi ojek, tukang, penjual jamu, pemilik warung, usaha laundry, dan seniman.

Tabel C.5
Iuran Jaminan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan/Informal

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	OB	10.000
2.	Jaminan Kematian (JKM)	OB	6.800

D. Satuan Biaya Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

1. belanja sewa alat komunikasi lainnya

Penganggaran sewa alat komunikasi di anggarkan untuk memenuhi kelancaran operasional kantor berdasarkan kebutuhan nyata.

Besaran belanja sewa alat komunikasi lainnya ditentukan sebagai berikut:

Tabel D.1
Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa Layanan Kedaruratan 112	Bulan	15.000.000
2.	Biaya Koneksi <i>Dedicated</i> IIX 30 Mbps IX 20 Mbps	Bulan	10.000.000
3.	Biaya Koneksi <i>Dedicated</i> IIX 35 Mbps IX 25 Mbps	Bulan	12.500.000
4.	Biaya Koneksi <i>Dedicated</i> IIX 40 Mbps IX 30 Mbps	Bulan	15.000.000
5.	Biaya Koneksi <i>Dedicated</i> IIX 45 Mbps IX 35 Mbps	Bulan	17.500.000
6.	Biaya Koneksi <i>Dedicated</i> IIX 55 Mbps IX 45 Mbps	Bulan	20.000.000
7.	<i>Zoom meeting pro - only 1 Host</i>	Per Bulan	350.000
8.	<i>Zoom meeting pro Large Meeting</i>	Per Bulan	1.650.000
9.	<i>Bulk Short Message Service (SMS)/ Blast</i>	Paket	1.500.000
10.	<i>Sewa Cloud Server</i>	Bulan	10.000.000
11.	<i>Contact Center Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 119. 1 SSL (Kantor Public Safety Center (PSC) 119)</i>	Bulan	11.850.000
12.	<i>Astinet Dedicated. 2 Mbps (Kantor Public Safety Center (PSC) 119)</i>	Bulan	2.460.000
13.	Email SPAM Filter	Paket	1.000.000
14.	SSL Wildcard	Paket	5.000.000
15.	Jasa Sewa Internet Administrasi Kependudukan (Adminduk)	Bulan	42.000.000

E. Satuan Biaya Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

1. belanja sewa bangunan gudang

Tabel E.1
Belanja Sewa Bangunan Gudang

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa Gudang Kurang Lebih 250 m ²	m ² /Tahun	150.000.000
2.	Luas Bangunan Kurang Lebih 500 m ²	m ² /Tahun	350.000.000
3.	Luas Bangunan Kurang Lebih 700 m ²	m ² /Tahun	500.000.000

G. Satuan Biaya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan

1. belanja kursus singkat/pelatihan

Tabel G.1
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pendaftaran Kejuaraan Nasional	Kegiatan	1.000.000
2.	Ujian Dinas	Orang	100.000
3.	Pelatihan PONED/Pelayanan Obstetri <i>Neonatal</i> Emergensi Dasar (PONED)	OK	4.500.000
4.	Belanja Pelatihan dan Sertifikasi <i>District Food Inspector</i> (DFI)	OK	5.000.000
5.	Belanja Pelatihan dan Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan	OK	5.000.000
6.	Pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal)	OK	4.500.000
7.	Pelatihan PPGDON	OK	4.500.000
8.	Pelatihan <i>Advanced Cardio Life Support</i> /Bantuan Hidup Jantung Lanjut	OK	5.500.000
9.	Pelatihan <i>Basic Trauma Cardiac Life Support</i> /kegawatdaruratan akibat trauma dan gangguan kardiovaskuler	OK	5.500.000
10.	Satuan Biaya Pelatihan untuk 4 hari	Orang	2.900.000
11.	Satuan Biaya Pelatihan untuk 5 hari	Orang	3.200.000

12.	Satuan Biaya Pelatihan untuk 7 hari	Orang	4.500.000
13.	Satuan Biaya Pelatihan untuk 9 hari	Orang	5.100.000
14.	Satuan Biaya Pelatihan untuk 10 hari	Orang	5.500.000
15.	Satuan Biaya Pelatihan untuk 12 hari	Orang	6.500.000
16.	Satuan Biaya Pelatihan Kebahasaan untuk 3 hari	Orang	1.203.000
17.	Bimbingan Teknis DPRD	OK	5.000.000
18.	Pelatihan Kompetensi Koperasi	Orang/Diklat	3.500.000
19.	Tenaga Kepelatihan BLK	OB	2.250.000

2. belanja bimbingan teknis

Tabel G.2
Belanja Bimbingan Teknis

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeriksa kesehatan peserta	OH	2.000.000
2.	Biaya ekspansi/ <i>advance group</i>	OH	450.000
3.	Pengamat kelas (<i>Class Master</i>)	OJ	50.000
4.	Pengawas Diklat	O/Akt	6.000.000
5.	Evaluator pembelajaran	OJ	100.000
6.	Seminar laboratorium kepemimpinan	OJ	200.000
7.	Seminar presentasi proyek perubahan	OJ	200.000
8.	Penanggung jawab program diklat	OJ	200.000
9.	Pembekalan akhir	OJ	200.000
10.	Pembimbing Orientasi Lapangan (OL)	OH	500.000
11.	Penjelasan program	OJ	200.000
12.	Pendamping <i>Outbound</i>	O/Akt	100.000
13.	Pembekalan awal	OJ	200.000
14.	Pendamping OL	OH	250.000
15.	Pejabat Penerima OL	OK	750.000
16.	Panitia Penerima OL	OK	500.000
17.	Pengawas Ujian	O/Mt	25.000
18.	Pemeriksa Ujian	O/Mt	100.000
19.	Penyelenggaraan Ujian Komprehensif	O/Pkt	4.000.000
20.	Tahap V/evaluasi	OJ	200.000
21.	Tahap IV/laboratorium kepemimpinan (<i>breakingthrough II</i>)	OJ	100.000

22.	Tahap III/merancang perubahan dan membangun tim	OJ	200.000
23.	Tahap II/ <i>taking ownership (breakingthrough I)</i>	OJ	100.000
24.	Tahap I/diagnosa kebutuhan perubahan	OJ	200.000
25.	Diklat Penyidik PNS Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 200 jp	Orang/Diklat	16.950.000
26.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	Orang / Kegiatan	4.500.000
27.	Diklat Penyidik PNS Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 300 jp	Orang/Diklat	21.375.000
28.	Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis	Orang/Diklat	3.240.000
29.	Diklat Dasar-dasar Kearsipan	Orang/Diklat	3.240.000
30.	Diklat Penyusutan Arsip	Orang/Diklat	4.510.000
31.	Diklat Pengelolaan Arsip Aktif	Orang/Diklat	3.240.000
32.	Diklat Pengelolaan Arsip In Aktif	Orang/Diklat	4.510.000
33.	Diklat Pengelolaan Arsip Statis	Orang/Diklat	4.510.000
34.	Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis	Orang/Diklat	3.240.000
35.	Diklat <i>Training of Trainer (TOT)</i> Kearsipan	Orang/Diklat	4.510.000
36.	Diklat Pengangkatan Arsiparis Kategori Keahlian	Orang/Diklat	13.790.000
37.	Diklat Pengangkatan Arsiparis Kategori Keterampilan	Orang/Diklat	13.140.000
38.	Tes Penempatan/ <i>Placement Test</i>	Orang	80.000
39.	Diklat Penyidik PNS Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Orang/Diklat	21.375.000
40.	Satuan Biaya Pelatihan Dasar CPNS dari Katagori 1 dan 2	Orang	2.242.000
41.	Pelatihan Dasar CPNS	Orang	9.296.000
42.	Pelatihan Perawat Gigi Jenjang Ahli	Orang/Diklat	5.500.000
43.	Pelatihan Bidan Jenjang Ahli	Orang/Diklat	5.500.000
44.	Pelatihan Teknis/Fungsional 10 Sepuluh Hari	Orang/Diklat	5.500.000
45.	Pelatihan Administrator Kesehatan Jenjang Ahli	Orang/Diklat	5.500.000
46.	Pelatihan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli	Orang/Diklat	5.500.000
47.	Pelatihan Penyuluh Pertanian	Orang/Diklat	9.500.000
48.	Pelatihan Profesi Kepamong Prajaan	Orang/Diklat	19.100.000
49.	Pelatihan Calon Widyaiswara tanpa seleksi 27 hari	Orang	12.650.000
50.	Pelatihan Calon Widyaiswara dengan seleksi 29 hari	Orang	15.500.000

51.	Pelatihan Epidemiologi Jenjang Ahli	Orang/Diklat	5.500.000
52.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor	19 Hari/ 150 JP	13.814.000
53.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan I	17 Hari/ 150 JP	13.081.000
54.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan II	19 Hari/ 150 JP	12.095.000
55.	Diklat Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas	10 Hari/90 JP	9.380.000
56.	Diklat Teknik Perlengkapan Jalan	6 Hari/50 JP	3.984.000
57.	Diklat Teknisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	14 Hari/ 100 JP	7.636.000
58.	Diklat Dasar Transportasi Darat	6 Hari/48 JP	3.374.000
59.	Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	12 Hari/ 100 JP	6.305.000
60.	Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan	12 Hari/ 100 JP	6.726.000
61.	Diklat Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12 Hari/ 100 JP	5.423.000
62.	Diklat Keselamatan Dasar	3 Hari/24 JP	2.536.000
63.	Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Orang/Kegiatan	9.000.000
64.	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Asesor SDM Aparatur (di luar Kantor BKN)	Orang/Kegiatan	9.377.000
65.	Belanja Penilaian Potensi Pegawai ASN di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	/peserta	1.373.000
66.	Pelatihan Fungsional Fisioterapi Terampil	Orang/Diklat	13.000.000
67.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial	Orang/Diklat	45.100.000
68.	Pelatihan Fungsional Okupasi Terapis Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
69.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
70.	Pelatihan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Orang/Diklat	13.000.000
71.	Pelatihan Fungsional Radiografer Terampil	Orang/Diklat	13.000.000
72.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
73.	Pelatihan Pembentukan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli	Orang/Diklat	13.000.000

74.	Pelatihan Fungsional Teknisi Elektro Medis Terampil	Orang/Diklat	13.000.000
75.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Ahli Pertanian Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
76.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
77.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
78.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
79.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
80.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Operator SIAK	Orang/Diklat	13.000.000
81.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Orang/Diklat	13.000.000
82.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama	Orang/Diklat	13.000.000
83.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Instruktur Terampil	Orang/Diklat	13.000.000
84.	Pelatihan Fungsional Guru	Orang/Diklat	13.000.000
85.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
86.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
87.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Orang/Diklat	13.000.000
88.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Orang/Diklat	13.000.000
89.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pustakawan	Orang/Diklat	13.000.000
90.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Ruang	Orang/Diklat	13.000.000
91.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Teknik	Orang/Diklat	13.000.000

	Tata Bangunan dan Perumahan		
92.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan	Orang/Diklat	13.000.000
93.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penilai Pajak	Orang/Diklat	13.000.000
94.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Hukum	Orang/Diklat	13.000.000
95.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian	Orang/Diklat	13.000.000
96.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Medik Veteriner	Orang/Diklat	13.000.000
97.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak	Orang/Diklat	13.000.000
98.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Orang/Diklat	13.000.000
99.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	Orang/Diklat	13.000.000
100.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Orang/Diklat	13.000.000
101.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Orang/Diklat	13.000.000
102.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	Orang/Diklat	13.000.000
103.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial	Orang/Diklat	13.000.000
104.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pembina Industri	Orang/Diklat	13.000.000
105.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	Orang/Diklat	13.000.000
106.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan	Orang/Diklat	13.000.000
107.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Orang/Diklat	13.000.000
108.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Instruktur	Orang/Diklat	13.000.000

109.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran	Orang/Diklat	13.000.000
110.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi	Orang/Diklat	13.000.000
111.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Orang/Diklat	13.000.000
112.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan	Orang/Diklat	13.000.000
113.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Widyaprada	Orang/Diklat	13.000.000
114.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli	Orang/Diklat	13.000.000
115.	Bidan Terampil	Orang/Diklat	4.580.000
116.	Perawat Terampil	Orang/Diklat	3.600.000
117.	Penera	Orang/Diklat	25.000.000
118.	Pranata komputer	Orang/Diklat	13.500.000
119.	Statistisi	Orang/Diklat	13.500.000
120.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	Orang/Diklat	8.200.000
121.	Auditor Kepegawaian	Orang/Diklat	8.384.000
122.	Assesor SDM Kepegawaian	Orang/Diklat	13.288.000
123.	Analisis Kepegawaian	Orang/Diklat	8.384.000
124.	Instruktrur Terampil	Orang/Diklat	7.124.166
125.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Orang/Diklat	18.831.666
126.	Pelatihan Auditor Pola Blended Learning dan Tatap Muka		
	Pelatihan Auditor Terampil	Orang/Diklat	9.600.000
	Pelatihan Auditor Ahli Pertama	Orang/Diklat	11.557.000
	Pelatihan Auditor Ahli Muda	Orang/Diklat	9.600.000
	Pelatihan Auditor Ahli Madya	Orang/Diklat	8.049.000
	Pelatihan Auditor Ahli Utama	Orang/Diklat	9.685.000
131.	Pelatihan Auditor Pola E-Learning		
	Pelatihan Auditor Terampil	Orang/Diklat	4.860.000
	Pelatihan Auditor Ahli Pertama	Orang/Diklat	5.738.000
	Pelatihan Auditor Ahli Muda	Orang/Diklat	4.860.000
	Pelatihan Auditor Ahli Madya	Orang/Diklat	4.152.000

	Pelatihan Auditor Ahli Utama	Orang/Diklat	4.536.000
	Penilaian Kompetensi Pegawai	Orang/Diklat	4.800.000
132.	Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Pertama	Paket	11.557.000
133.	Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Muda	Paket	9.600.000
134.	Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Madya	Paket	8.094.000

H. Satuan Biaya Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Tabel H.1

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat
Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Kepala Daerah/Ketua DPRD)	Unit/Triwulan	4.190.000
2.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Anggota DPRD)	Unit/Triwulan	4.100.000
3.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Pejabat Eselon I)	Unit/Triwulan	4.000.000
4.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Pejabat Eselon II)	Unit/Triwulan	3.841.000
5.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Pejabat Eselon III)	Triwulan	3.492.000
6.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Roda Empat)	Unit/Triwulan	3.341.000

7.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Kendaraan Roda 4 / Lebih	Unit/Triwulan	5.000.000
----	---	---------------	-----------

I. Satuan Biaya Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Satuan biaya pemeliharaan aset tetap lainnya meliputi belanja pemeliharaan taman yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel I.1
Pemeliharaan Tanaman

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Tanaman <i>Landscape</i>	Set	15.000.000
2.	Pemeliharaan Tanaman <i>Indoor</i>	Pot11	45.000
3.	Pemeliharaan Tanaman <i>Indoor</i>	Pot	110.000

L. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

3. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan pada Kegiatan Padat Karya

Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan padat karya, yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi pekerja padat karya (penganggur dan setengah penganggur yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan padat karya), sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel L.11
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan pada
Kegiatan Padat Karya

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Ketua Kelompok	OH	80.000
2.	Tukang	OH	75.000
3.	Pekerja	OH	70.000

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR